



WALIKOTA JAMBI

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2020

Laporan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Laporan Kinerja adalah suatu kewajiban daerah dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah selama satu tahun anggaran, yang tentunya akan menjadi media evaluasi.

Adapun substansi dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi, mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian dan perwujudan visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, yakni **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”**.

Visi dimaksud merupakan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintahan daerah dan juga segenap lapisan dan komponen masyarakat dalam berkarya, serta menjadikannya sebagai instrumen dalam meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan serta kemajuan Kota Jambi.

Untuk melihat gambaran umum mengenai kinerja Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2020, dapat dilihat dari Indikator Makro Daerah, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); kondisi inflasi; serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada Maret 2020, virus Covid-19 telah masuk ke Indonesia dan menjadi pandemi yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Kondisi ini secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian global. Hal ini tentu juga memberikan tekanan berat bagi perekonomian Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir disepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sebagai ibukota Provinsi Jambi yang menjadi pusat

perdagangan dan jasa, tentunya keadaan ini berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan. Sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam merupakan sektor yang menjadi unggulan perekonomian Kota Jambi, seperti sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Dampak pandemi juga sangat terasa bagi Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah berkurangnya Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat, PAD, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta terhambatnya Belanja Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kebijakan pengetatan.

Berbagai upaya dan strategi telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun 2020 dalam menghadapi kondisi pandemi tersebut, diantaranya adalah mengurangi dan merasionalisasi Belanja Daerah pada kegiatan yang tidak efektif; memastikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan daerah; memperluas sosialisasi, diseminasi dan komunikasi publik melalui berbagai media cetak elektronik dan media sosial.

Lebih dari itu Pemkot Jambi juga telah mengambil berbagai langkah dan kebijakan, diantaranya adalah :

1. Kebijakan anggaran;

Re-focussing APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar 58,21 Miliar Rupiah.

2. Kebijakan Stimulus bagi Dunia Usaha dan Masyarakat, seperti:

- Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang Pembayaran bulan Mei dan Juni;
- Membebaskan 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah;
- Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember 2020.

3. Kebijakan Ekonomi Sosial Kemasyarakatan, seperti:

- Melibatkan UMKM dalam penyediaan masker dan APD serta konsumsi dan transportasi untuk tetap menjaga produktivitas dunia usaha;
- Melakukan berbagai kegiatan dan menyiapkan aturan-aturan (Perwal, instruksi, edaran dan himbauan termasuk SKB) dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Jambi;
- Menyiapkan program-program jaring pengaman sosial dan padat karya yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Sejalan dengan itu, Pemkot Jambi juga terus berupaya memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa yang terdampak pandemi untuk menjaga dan memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, kinerja pengelolaan ekonomi daerah juga ditunjukkan dengan perkembangan inflasi daerah. Inflasi Kota Jambi tercatat sebesar 3,09 persen Pada tahun 2020.

Selanjutnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 78,37 poin dibanding pada tahun 2019 sebesar 78,26 poin, hal tersebut menandakan bahwa Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah serta Pendapatan Perkapita masyarakat kota Jambi semakin baik.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Banyak kebijakan yang ditempuh dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik itu upaya-upaya intensifikasi, maupun yang terkait dengan ekstensifikasi; misalnya kami terus mengevaluasi dan mengkaji perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah yang valid; menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih tertib; mengoptimalkan pelaksanaan pendataan dengan melakukan survei lapangan terhadap objek pajak dan retribusi daerah; memverifikasi kebenaran laporan wajib pajak dan retribusi daerah; menyelesaikan keberatan wajib pajak; melakukan penagihan atas tunggakan pajak; pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan juga kerjasama pihak terkait dalam memudahkan pengawasan pembayaran pajak daerah diberbagai sektor penerimaan.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada Tahun 2020, **total realisasi Pendapatan Daerah** Kota Jambi dari sumber-sumber tersebut mencapai 1,559 Triliun Rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang sebesar 1,699 Triliun Rupiah, maka Total Realisasi Pendapatan Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 8,26% atau turun 140 Miliar Rupiah lebih. Penurunan ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya aktivitas ekonomi, sehingga berkurangnya penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Adapun Penerimaan dari masing-masing Pos Pendapatan tersebut meliputi:

- ◆ Target penerimaan PAD pada tahun 2020 sebesar 369,59 Miliar Rupiah, dan terealisasi sebesar 355,50 Miliar Rupiah atau 96,19 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019 sebesar 393,42 Miliar Rupiah, maka PAD Tahun 2020 menurun 9,64 persen atau sebesar 37,92 Miliar Rupiah;
- ◆ Target penerimaan Dana Perimbangan pada tahun 2020 sebesar 1,033 Triliun Rupiah, dan terealisasi sebesar 1,036 Triliun Rupiah atau 100,31 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2019 sebesar 1,11 Triliun Rupiah, maka Dana Perimbangan Tahun 2020 menurun 6,64 persen atau sebesar 73,71 Miliar Rupiah;
- ◆ Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 sebesar 214,84 Miliar Rupiah, dan terealisasi sebesar 167,20 Miliar Rupiah atau 77,84 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar 195,93 Miliar Rupiah, maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 menurun 14,65 persen atau sebesar 28,7 Miliar Rupiah.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan ke BPK-RI untuk diaudit, pada Tahun 2020 Belanja Daerah adalah sebesar 1,82 Triliun Rupiah lebih yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar 1,05 Triliun Rupiah dan Belanja Tidak Langsung sebesar 775,56 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2019 sebesar 1,84 Triliun Rupiah, maka Belanja Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,08 persen persen atau 19,9 Miliar Rupiah lebih.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, masih menunggu hasil audit dari BPK RI, dan selanjutnya akan disampaikan secara lebih rinci didalam Nota Keuangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2020.

MENGENAI PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Jambi menetapkan agenda Prioritas Pembangunan Kota Jambi pada Tahun 2020, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah.
5. Good Governance.

Selanjutnya secara garis besar akan disampaikan berbagai program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama tahun 2020, yang juga merupakan pelaksanaan tugas desentralisasi baik yang bersifat wajib maupun pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, yang akan kami sampaikan berdasarkan Prirotas Pembangunan Tahun 2020.

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bagian yang strategis dalam mendukung upaya kita semua untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah cara yang paling tepat dalam mengakselerasi perubahan, kemajuan dan juga tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Pembangunan Pendidikan, difokuskan pada upaya menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, penerapan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan aspek intelektual, melainkan juga kemampuan interaksi sosial dan juga interpersonal, pendidikan

watak dan budi pekerti, nasionalisme, pendidikan vokasi dan ketrampilan dan kewirausahaan.

Pada Tahun 2020, untuk penyelenggaraan urusan pendidikan telah dialokasikan anggaran melalui APBD Kota Jambi sebesar 444,64 Miliar Rupiah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 319,18 Miliar Rupiah dan Belanja Langsung sebesar 125,45 Miliar Rupiah.

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 1,82 Triliun Rupiah, maka persentase anggaran untuk belanja urusan pendidikan adalah sebesar 24,31 persen. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009.

Program **Jambi Cerdas** merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Jambi dalam mensukseskan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun guna mewujudkan hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap anak dalam meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, dengan sasaran peserta didik yang rawan putus sekolah dari keluarga ekonomi tidak mampu di wilayah Kota Jambi. Adapun anggaran program Jambi Cerdas pada tahun 2020 sebesar 2,59 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 1.611 siswa dari masyarakat kurang mampu di Kota Jambi.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi 2018-2023, sejumlah target indikator kinerja utama daerah dibidang pendidikan telah dapat kita capai, yakni:

- ◆ Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2020 ditargetkan 14,61 dapat kita realisasikan sebesar 15,10;
- ◆ Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 17,32% dapat kita capai sebesar 17,32%
- ◆ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 10,69 dan dapat kita capai sesuai target yakni sebesar 10,92

Pada tahun 2020 pembangunan bidang kesehatan diarahkan guna peningkatan kemudahan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta merevitalisasi infrastruktur dan juga sarana prasarannya.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi 2018-2023, sejumlah target indikator kinerja utama daerah dibidang kesehatan telah dapat kita capai, yakni Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72,35 dan dapat kita capai melebihi target yakni sebesar 72,65.

Investasi merupakan bagian yang strategis dalam mendongkrak aktivitas ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja baru. Realisasi Investasi PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal pada tahun 2020 tercatat sebesar 249,4 Miliar Rupiah. Pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan terhadap investasi pada tahun 2020.

Saat ini Pemkot Jambi telah memiliki “Sistem Perizinan Online Kota Jambi” yang mengakomodir 82 jenis perizinan. Pada tahun 2020, telah diterbitkan 3.001 izin baru dan izin yang diregistrasi sebanyak 3.456 perizinan.

Peningkatan sektor koperasi dan UKM dilakukan dengan meningkatkan daya saing, kemandirian, partisipasi daya inovasi dan juga kreativitas para pelaku Koperasi dan UKM. Pada tahun 2020 sesuai dengan indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Jambi, Pemkot Jambi dapat merealisasikan target peningkatan UKM yang berkualitas sebesar 8,54% atau UKM yang berkualitas bertambah 50 unit menjadi 920 unit UKM yang berkualitas dari jumlah UKM sebanyak 10.763 unit. Demikian halnya dengan peningkatan Koperasi berkualitas yang realisasinya melebihi target yakni 19,73% dari target 19,27%, sehingga saat ini Koperasi yang berkualitas berjumlah 43 unit dari 218 unit koperasi aktif.

Untuk meningkatkan kapasitas kota dan juga mendukung kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Jambi, Pemkot Jambi terus memantapkan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dan juga peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang baik dan memadai; yang merata dan terintegrasi dengan sistem perkotaan serta didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adapun hasil yang telah dicapai terkait dengan peningkatan dan pembangunan infrastruktur selama Tahun 2020 adalah :

1. Terlaksananya perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan status Kota dengan Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 91,79% atau sepanjang 468.56 dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2020 baru mencapai 87,54% atau sepanjang 446,84 km;
2. Terlaksananya peningkatan drainase pada alur sekunder dan tersier, dengan target rasio panjang drainase dalam kondisi baik

sebesar 100% dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan dapat direalisasikan sesuai target;

3. Pengurangan titik genangan dari jumlah total titik genangan sebanyak 19 titik, pada tahun 2020 ditargetkan penyelesaian 3 titik genangan dan terealisasi penyelesaiannya sebanyak 6 titik genangan;
4. Target cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi sebesar 69,39% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan 70,99%.

Selain hal tersebut, pada penyelenggaraan urusan perumahan telah diperoleh hasil diantaranya adalah:

1. Target Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani hingga tahun 2020 sebesar 86,11% atau sekitar 849,52 Ha dan baru terealisasi sebesar 837,57 Ha;
2. Target Persentase Pemenuhan Rumah Bagi MBR hingga tahun 2020 sebanyak 35.600 KK dan terealisasi sebanyak 36.975 KK atau 103,86%;
3. Target Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum hingga tahun 2020 sebanyak 16.400 titik LPJU dan terealisasi sebanyak 17.832 titik atau 108,73%.

Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah:

1. Target Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 adalah sebesar 38,30 dan terealisasi sebesar 39,60;
2. Target Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 adalah sebesar 80,72 dan terealisasi sebesar 84,51;
3. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 adalah sebesar 44,81 dari target sebesar 41,70, sehingga persentase

capaian kinerjanya sebesar 107,5%, melebihi dari target yang direncanakan.

4. Target persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber tahun 2020 adalah sebesar 12,73% dan terealisasi sebesar 12,85%;
5. Target persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2020 adalah sebesar 78,16% dan terealisasi sebesar 78,71%.

Pada tahun 2020 Pemkot Jambi mampu meraih berbagai jenis penghargaan dan prestasi, diantaranya adalah :

- ◆ **Penghargaan Top Digital Innovation Awards 2020**, dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas upaya dan komitmen di bidang teknologi dan informasi.
- ◆ **Penghargaan Inovasi TOP-99** dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas kinerja yang sungguh-sungguh dalam menciptakan inovasi Bangkit Berdaya.
- ◆ **Natamukti** dari Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia bersama ICSB (*International Council for Small Business*) atas keberhasilan dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM di Kota Jambi
- ◆ **Penghargaan Atas Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018** dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Jambi Tahun 2019 dengan status Kinerja Sangat Tinggi.
- ◆ **Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019** dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas upaya dan kepedulian terhadap HAM.
- ◆ **Piala dan Piagam Innovative Government Award (IGA) 2020** dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kategori Kota Sangat Inovatif.

- ◆ **Nirwasita Tantra "Green Leadership" Tahun 2020** dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas inovasi dan kepemimpinan dalam merespon persoalan lingkungan hidup di daerah.

WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, ME